KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Harry Azhar Aziz Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Belum tentu ada penyalahgunaan anggaran kunker
Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

HARRY AZHAR AZIZ KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Belum Tentu Ada Penyalahgunaan Anggaran Kunker

● OLEH **FITRIYAN ZAMZAMI**

Beredar kabar bahwa BPK menemukan kerugian negara dalam audit kunjungan kerja anggota DPR. Benarkah isu tersebut?

Jadi begini. Sebenarnya yang terjadi adalah anggota III BPK melakukan penelusuran atas kunjungan kerja DPR. Dari situ, ditemukan ada sejumlah pencatatan laporan perjalanan yang tak dilakukan anggota DPR.

Bagaimana maksudnya ketiadaan catatan tersebut?

Misalnya tiap anggota DPR itu mendapat dana Rp 30 juta untuk kunjungan kerja. *Nah* dari dana tersebut ada yang untuk konstituen, dan akomodasi seperti transportasi, makan, dan hotel.

Untuk staf ahli juga kita tidak tahu dibiayai atau tidak. Biasanya hal-hal tersebut dilaporkan. Tapi untuk tahun kemarin dicek *kok* tidak ada laporannya.

Apakah kemudian hal tersebut mengindikasikan penyalahgunaan anggaran?

Belum tentu begitu. Belum tentu ada penyalahgunaan keuangan. Bisa jadi anggota-anggota dewan tak mengetahui tata cara laporan keuangan. Bisa jadi memang tak disalahgunakan namun tak dilaporkan.

Saya, saat menjadi anggota DPR dulu (dari Fraksi Golkar) biasanya menugaskan staf ahli untuk membuat laporan keuangan.

Bagaimana kemudian BPK menindaklanjuti hal tersebut?

Kami kemudian mengirimkan

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

WIDODO S JUSUF/ANTARA



surat pada Setjen DPR dan meminta hal tersebut dibenarkan. Sekjen kemudian mendatangi anggota dewan dan fraksi untuk melengkapi laporan.

Jika dana digunakan individu DPR maka dia yang melapor. Kalau fraksi yang menggunakan maka fraksi yang melapor.

Bagaimana jika kemudian laporan tak dibenahi?

Kami memberi waktu 60 hari hingga akhir Mei nanti. Jika sampai akhir Mei tidak ada laporan bisa saja bermasalah.

Benarkan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp 900 miliar?

Itu saya belum menghitungnya.

■ **ed:** fitriyan zamzami